



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembara Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas (LAK);
  - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
  - e. Laporan Operasional (LO);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.352.095.367.932,46
b. Belanja	Rp.	1.664.595.109.458,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	<u>(312.499.741.525,54)</u>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	345.448.213.309,53
- Pengeluaran	Rp.	6.926.295.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>338.521.918.309,53</u>

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (261.410.048.055,01) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.613.505.415.987,47
b. Realisasi	Rp.	1.352.095.367.932,46
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	<u>(261.410.048.055,01)</u>

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 287.432.224.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.952.027.334.297,00
b. Realisasi	Rp.	1.664.595.109.458,00
Selisih lebih (kurang)	Rp.	<u>287.432.224.839,00</u>

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah 26.022.176.783,99 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(338.521.918.309,53)
b. Realisasi	Rp.	(312.499.741.525,54)
Selisih lebih (kurang)	Rp.	<u>26.022.176.783,99</u>

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	345.448.213.309,53
b. Realisasi	Rp.	345.448.213.309,53
Selisih lebih (kurang)	Rp.	0,00

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6.926.295.000,00
b. Realisasi	Rp.	6.926.295.000,00
Selisih lebih (kurang)	Rp.	0,00

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	338.521.918.309,53
b. Realisasi	Rp.	338.521.918.309,53
Selisih lebih (kurang)	Rp.	0,00

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	4.392.845.812.025,63
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	74.025.420.562,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	4.318.820.391.463,63
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp.	4.392.845.812.025,63

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015	Rp.	318.385.857.550,53
b. Arus Kas dari Aktivitas operasi	Rp.	279.144.823.376,46
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp.	(590.624.750.525,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(6.926.295.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	32.166.587,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp.	26.022.176.783,99

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih ( Awal )	Rp.	345.448.213.309,53
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	(345.448.213.309,53)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	26.022.176.783,99
d. Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain – Lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih ( Akhir)	Rp.	26.022.176.783,99

#### Pasal 7

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah Pendapatan LO	Rp.	1.331.529.136.616,85
b.	Jumlah Beban LO	Rp.	1.336.947.718.532,48
c.	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	(5.418.581.915,63)
d.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	Rp.	0,00
e.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	(5.418.581.915,63)
f.	Surplus/Defisit LO	Rp.	(5.420.026.508,63)

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	5.428.373.918.385,46
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(5.420.026.508,63)
c.	Dampak Akumulasi Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2015	Rp.	(1.104.133.500.413,20)
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	4.318.820.391.463,63

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

- a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran 1.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran 1.2: Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran 1.3: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
- Lampiran 1.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran 1.5: Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran 1.6: Daftar Penyertaan Modal Investasi Daerah;
- Lampiran 1.7: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran 1.8: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lain;
- Lampiran 1.9: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- Lampiran 1.10: Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran 1.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- e. Lampiran V : Laporan Operasional (LO)
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Wali kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 23 September 2016  
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 23 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

M. SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 7  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
(7/75/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
SETDA Bontang



H. Hariyadi, SH, MM  
Pembina TK I/ IV.b  
NIP. 19621010 198903 1027

[www.bontangkota.go.id](http://www.bontangkota.go.id)

